

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Pasar Induk Amuntai)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Pengajuan Skripsi
Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

MIRNA ANGGRAINI

NPM: 2022081

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : Mirna Anggraini

NPM : 2022081

Program Studi : S1 Administrasi Publik

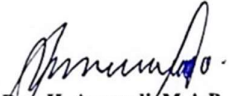
Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai)"**

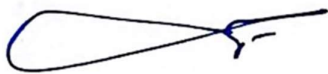
Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, 08 April 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Drs. H. Arpandi M.A.P.
NUPTK. 8553741642130083


Dr. Agus Surva Dharma, Sos. M.A.P.
NUPTK. 4142764665137003

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Publik


Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau serta pengikutnya hingga akhir zaman. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH HULU SUNGAI UTARA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR, STUDI KASUS : PASAR INDUK AMUNTAI”**. Dalam proses penyusunan proposal skripsi ini, banyak sekali sumbangan pikiran dan pemberian data yang penulis dapatkan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M. AP., CIQnR., CIQaR., selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Ahmad Baihaqi S.Sos., M.A. selaku Plt. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Drs. H. Arpandi, M.A.P . selaku Dosen Pembimbing I Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
4. Bapak Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos. M.A.P . selaku Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
5. Kepada seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis.

6. Dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan proposal skripsi ini hingga selesai.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal yang baik dan mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangatlah penulis harapkan. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	7
B. Tinjauan Teoritis	11
C. Kerangka Pemikiran	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	26
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Tipe Penelitian.....	27

D. Data dan Sumber Daya	28
E. Desain Operasional Penelitian	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data	33
H. Uji Kredibilitas Data.....	35

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3. 1 Informan Penelitian	29
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian.....	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi ekonomi. Meskipun tidak memiliki batas geografis yang jelas, pasar dapat terbentuk di berbagai tempat, seperti pasar tradisional, supermarket, dan platform online. Pasar mencakup segala aktivitas penawaran dan permintaan atas berbagai jenis sumber daya ekonomi, seperti tenaga kerja, modal, surat berharga, dan uang. Melalui mekanisme pasar, penawaran dan permintaan akan saling bertemu dan membentuk harga yang mengatur alokasi sumber daya di masyarakat.

Dalam pasar, pembeli dan penjual saling bergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan ekonomi masing-masing. Para pembeli akan mencari barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, sementara penjual berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya. Sedangkan dalam Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 pada Bab 1 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa "pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, supermarket, mini market, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya".

Adapun pada Bab 1 pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa "Pasar Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pasar Daerah adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan

lapak/tenda" berdasarkan pasal tersebut Pasar Induk Amuntai Kecamatan Amuntai Tengah adalah termasuk pasar yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasar diklasifikasikan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, dan pasar tradisional juga hanya mempunyai bangunan yang sederhana seperti kios-kios atau gerai yang dibuka oleh penjual atau pengelola pasar. Sebaliknya berbeda dengan pasar tradisional, pasar modern adalah tempat-tempat bertemunya penjual dan pembeli yang tidak bertransaksi secara langsung namun pembeli hanya melihat label harga yang tercantum dalam barang, pasar modern juga mempunyai bangunan yang lebih bagus dibandingkan dengan pasar tradisional. Selain itu dalam segi pelayanan pasar modern dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga misalnya hypermart, pasar swalayan supermarket atau minimarket.

Dilihat dari perkembangannya pasar dapat diartikan sebagai lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi yang dikelola oleh pemerintah sehingga transaksi perdagangan dapat terjadi dengan baik, pasar berkembang menjadi salah satu penggerak utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat dan kegiatan ekonomi masyarakat tidak akan berjalan tanpa adanya pasar. Penataan pasar merupakan segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur dan menata meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar dalam penataan ini banyak pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap penataan tempat yang sudah disediakan pemerintah.

Perkembangan pasar rakyat yang gencar dilakukan oleh pemerintah adalah sebuah program pembangunan dengan tujuan untuk melawan dominasi pasar-pasar ritel modern yang mendominasi ekonomi pasar di Indonesia. Pasar tradisional dengan kondisi yang lama tidak dapat bertahan dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh pasar modern. Revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar rakyat diharapkan dapat meningkatkan omset, mendukung kelancaran logistik, distribusi bahan, dan penguatan pasar di dalam negeri di era global (Kemendag, 2016). Pasar rakyat juga ditargetkan untuk menjangkau pelanggan yang masih berusia muda untuk berbelanja di pasar rakyat, pelanggan yang berusia muda memiliki persepsi lain tentang pasar, dengan adanya teknologi pelanggan yang masih muda memiliki pertimbangan yang banyak serta adanya keinginan untuk sesuatu hal yang baru. Perubahan pasar tradisional menjadi pasar rakyat juga dapat membuat sebuah daya tarik tersendiri bagi pelanggan usia muda.

Revitalisasi pasar ini dilakukan guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat sehingga menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetik. (tidak kumuh).

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui adanya permasalahan yang muncul pada Pasar Induk Amuntai di antaranya :

1. Kurangnya kesadaran pemerintah terhadap Kebersihan Lingkungan Selain faktor pengelola pasar lainnya, serta antara pemerintah terhadap masyarakat kurangnya edukasi tentang kebersihan. Rendahnya kesadaran ini memperparah kondisi pasar yang kumuh dan menciptakan citra negatif terhadap pasar tradisional, sehingga dapat menurunkan minat masyarakat untuk berbelanja.

2. Keamanan serta pengawasan yang masih rendah menimbulkan dampak kepada para pengunjung, Hal ini dapat menurunkan kenyamanan berbelanja serta berpotensi membuat masyarakat enggan datang ke pasar, yang dimana pemerintah belum memaksimalkan keamanan pasar secara merata.
3. Beberapa staff yang masih kurang memerperhatikan pengelolaan terhadap bangunan terdapat sejumlah toko yang mengalami kerusakan cukup parah dan tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Kerusakan tersebut meliputi atap yang bocor sehingga mengganggu aktivitas saat hujan, struktur bangunan yang mulai rapuh. Bahkan, beberapa kios yang rusak akhirnya ditinggalkan oleh pemiliknya dan tidak lagi dimanfaatkan secara produktif. Terdapat pula toko atau kios yang masih dalam kondisi layak pakai, namun justru dibiarkan kosong dan tidak pernah digunakan sejak dibangun atau setelah ditinggalkan penyewa sebelumnya.
4. Kurangnya pemerintah dalam mengoptimalkan serta memperbarui SOP yang berlaku terhadap masyarakat khususnya para pembeli atau pedagang, SOP yang kurang ditegaskan pada lapangan sehingga masih banyak yang belum tahu tentang SOP yang masih berlaku.

Berdasarkan fenomena tersebut oleh karena itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai)”**

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas, yang berkaitan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai), maka masalah penelitian ini dibatasi sebagai Teori George C. Edward, Abdal (2025:148-149) :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) ?
2. Faktor – faktor yang memengaruhi pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, sejauhmana pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai).

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan khususnya dalam masalah kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang akan berguna untuk menjelaskan dan memecahkan suatu masalah dalam kebijakan publik serta menambah ilmu pengetahuan.
- b) Bagi penelitian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintahan Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Rina Yanti (2024) Dalam Jurnal Kebijakan Publik Vol. 1. NO. 4, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai Program Studi Administrasi Publik dalam penelitian dengan berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Danau Panggang)”. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Hasil penelitian ini Pasar Danau Panggang merupakan salah satu pasar pemerintah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya berada di Kecamatan Danau Panggang. Penelitian ini dilatarbelakangi yaitu masih kurangnya informasi dari dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) UPT pasar terkait Peraturan Daerah No. 17 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menginterpretasikan Implementas Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian dekriptip kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil sampel secara Purposive Sampling data sebanyak 10 orang. Data

di analisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, dan mengadakan member check. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Kurang baik dilihat di indikator berikut yaitu indikator yang kurang terimplemetasi dengan baik; kejelasan standar, tujuan kebijakan, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, pola-pola hubungan, kondisi sosial, dan tingkat komitmen. Indikator yang cukup baik; normanorma dan kondisi ekonomi. Sedangkan indikator yang sudah baik; komunikasi dengan instansi lain, koordinasi dengan instansi lain, struktur birokrasi, kondisi politik, tanggapan pelaksana, dan pemahaman pelaksana. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua. Pertama, faktor pendorong yakni adanya koordinasi dengan instansi lain. Kedua, faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi terhadap pedagang maupun masyarakat mengenai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan kurang maksimalnya para pelaksana serta fasilitas yang kurang memadai. Agar Implementasi berjalan dengan baik, maka kepada Kepala UPT Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya lebih memperhatikan sarana dan prasarana pada pasar Danau Panggang, juga rutin dan berkelanjutan dalam melakukan sosialisasi tentang Peraturan No. 17 Tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar informasi terkait perda dapat di terima secara utuh dan merata oleh pedagang.

2. Iwan (2025) Dalam Jurnal Kebijakan Publik JIL 2 NO. 3 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai Program Studi Administrasi Publik dalam penelitian dengan berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang). Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif tipe deskriptif. Hasil penelitian. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar menegaskan bahwa pasar harus dikelola secara bertahap dan berkesinambungan guna memastikan keberlanjutan fungsinya sebagai pusat aktivitas ekonomi bagi pedagang dan pembeli. Fenomena masalah yang ditemukan peneliti yaitu tidak adanya himbauan dari pihak pengelola pasar terkait menjaga kebersihan pasar, sebagian tempat berjualan di pasar terlihat rusak dan akses jalan yang becek serta berlubang, kurangnya pengawasan dari dinas pengelola pasar dalam menjaga ketertiban dan kebersihan Pasar Pinang Habang diakibatkan kurangnya petugas keamanan. Penelitian ini bertujuan ntuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang) dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Sumber data diperoleh melalui teknik snowball sampling dengan jumlah informan sebanyak 12 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian

dianalisis dengan proses pengumpulan, kondensasi, dan penyajian data. Untuk mengevaluasi kredibilitas data digunakan beberapa metode seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan referensi, serta melakukan member check. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang) kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada beberapa indikator yang kurang baik yaitu penyampaian informasi, kejelasan informasi, konsistensi, ketersediaan petugas, kompetensi atau kemampuan petugas, sumber daya finansial, sifat demokrasi dan SOP. Adapun indikator yang sudah baik yaitu kejujuran petugas sedangkan indikator yang cukup baik yaitu komitmen petugas dan pembagian wewenang. Faktor yang mendukung implementasi tersebut yaitu petugas yang jujur dalam menjalankan tugas, petugas yang sudah komitmen dan pembagian tugas yang baik antar petugas. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya sosialisasi, tidak adanya kejelasan informasi, kurangnya konsisten petugas dalam menyampaikan informasi, kurangnya tenaga kerja yang memadai, kurangnya anggaran, kurangnya kepatuhan dan kemampuan petugas, petugas yang belum memberikan sarana kepada masyarakat untuk memberikan keluhan dan saran dan SOP yang belum berjalan dengan maksimal. Untuk meningkatkan Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar (Studi Kasus Pasar Pinang Habang), disarankan Kepada Kepala Dinas Perdagangan agar meningkatkan upaya sosialisasi terhadap isi Peraturan Daerah agar bisa dipahami oleh semua pihak, perlu

merekrut tenaga kerja tambahan untuk petugas kebersihan dan pengawasan pasar. Kepada Petugas Pasar diharapkan mampu menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kepada Pedagang agar menjaga kebersihan lapak masing-masing dan tidak membuang sampah sembarangan. Kepada Masyarakat untuk tidak membuang sampah secara berserakan di area pasar dan tetap menjaga fasilitas yang sudah disediakan serta aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja petugas pasar.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan yang dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan

sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.

Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Implementasi kebijakan dapat dikatakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Adapun model-model implementasi kebijakan publik sebagai berikut :

1) Implementasi Kebijakan Model George C. Edward

Dalam Pandangan George C. Edward dalam Abdal (2025:148-149)

Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya yang walaupun isi kebijakannya sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumberdaya finansial.
- c) Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur birokrasi merupakan struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting di setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures) atau SOP.

2) Implementasi Kebijakan Model Van Metter dan Carl Van Horn

Adapun enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2020:150-153) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, dimana kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanyajika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan.
- b) Sumber daya, dimana keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi dan sumber daya lain yang perlu diperhitungkan adalah sumber daya finansial dan waktu.

- c) Karakteristik agen pelaksana, dimana pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat pengimplementasian kebijakan publik
- d) Sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana merupakan sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik
- e) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mana ini perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan publik yang ditetapkan.

3) Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grandle

Ada dua variabel menurut Merilee S. Grandle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian outcomes (yaitu tercapai tidaknya tujuan yang ingin diraih) Yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- a) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksana kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan menunjuk pada aksi kebijakannya.
- b) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok serta tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing – masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan George C. Edward dalam Abdal (2025:148-149), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

b) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.

c) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik, seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya standard operating procedures atau yang disingkat SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan secara umum, pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk

kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah.

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris "policy". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetensi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Menurut Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata

lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

a. Tahap – tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip dalam buku Muhammad Sawir, dkk (2025:6-8) adalah sebagai berikut :

1) Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4) Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

3. Pengelolaan Pasar

a. Definisi Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam buku Anna Sopanah, Renny Kurniawati, Dwi Anggraini (2023:41) pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut George R. Terry dalam buku Saifuddin (2018:53), pengelolaan merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Adapun pendapat dari prajudi Atmosudirjo dalam buku Saifuddin (2018:53), pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Sedangkan menurut Rebert T. Kiyaso dan Sharon L, pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya dan terutama pengelolaan informasi. Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian pekerjaan atau asaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

b. Asas Pengelolaan

Adapaun asas pengelolaan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemanusiaan
- 2) Keadilan
- 3) Keamanan kedudukan
- 4) Ketertiban dan kepuasan hukum
- 5) Kelestarian lingkungan
- 6) Kejujuran usaha
- 7) Persaingan sehat (fairnees)

4. Pengertian Pasar

Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian, sebagai pengaturan yang

memungkinkan pembeli dan penjual untuk item pertukaran. Persaingan sangat penting dalam pasar dan memisahkan pasar dari perdagangan.

Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan pada satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan.

A. Klasifikasi Pasar

Adapun klasifikasi pasar adalah sebagai berikut:

1) Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan padangan terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

2) Pasar Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti buah, sayuran, daging. Sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama.

B. Jenis – jenis Pasar

Jenis pasar memiliki beragam kategori, yaitu sebagai berikut:

1) Jenis - jenis pasar berdasarkan bentuk kegiatannya

a) Pasar nyata (konkret)

Pasar nyata atau pasar konkret merupakan suatu pasar dimana terdapat beragam jenis barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh pembeli. Contoh dari pasar nyata ini ialah pasar swalayan dan juga pasar tradisional.

b) Pasar tidak nyata (abstrak)

Pasar tidak nyata atau pasar abstrak merupakan suatu pasar dimana proses jual beli tidak dilakukan secara langsung, tetapi hanya menggunakan surat dagang saja. Contoh dari pasar tidak nyata ini adalah pasar online, pasar modal dan pasar saham.

2) Jenis – jenis pasar berdasarkan transaksinya

a) Pasar tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional dimana para pembeli dan penjual bisa saling tawar menawar secara langsung.

b) Pasar modern

Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana terdapat beragam macam barang yang diperjualbelikan dengan harga yang telah pas dan dengan layanan yang mandiri.

3) Jenis – jenis pasar berdasarkan jenis barangnya

a) Pasar barang konsumsi

Pasar barang konsumsi ialah suatu pasar yang memperjualbelikan beragam jenis barang yang bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhankebutuhan kehidupan sehari-hari manusia.

b) Pasar sumber daya produksi

Pasar sumber daya produksi adalah suatu pasar yang memperjualbelikan barang-barang atau jasa faktor-faktor produksi. Misalnya tenaga kerja, mesin-mesin dan tenaga ahli.

4) Jenis – jenis pasar berdasarkan waktunya

a) Pasar harian

Pasar harian adalah tempat dimana pertemuan antara pembeli serta penjual yang bisa dilakukan setiap harinya. Umumnya menjual beragam jenis barang kebutuhan konsumsi, kebutuhan bahan mentah, kebutuhan jasa, serta kebutuhan produksi.

b) Pasar mingguan

Pasar mingguan adalah pasar yang melakukan kegiatannya setiap seminggu sekali.

c) Pasar bulanan

Pasar bulanan adalah pasar yang melakukan kegiatannya sebulan sekali dan hanya terdapat di daerah-daerah tertentu, para pembeli dipasar ini membeli barang-barang tertentu dan kemudian dijual kembali. Contohnya seperti pasar hewan.

d) Pasar tahunan

Pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan tiap setahun sekali. Pasar tahunan bersifat nasional dan diperuntukan untuk promosi terhadap sebuah produk baru. Contoh pasar tahunan seperti pameran pembangunan, Pekan Raya dan lain-lain.

e) Pasar kontemporer

Pasar kontemporer adalah pasar yang diselenggarakan hanya pada waktu tertentu serta pasar temporer bisa terjadi secara tak rutin atau hanya sekali saja. Contohnya seperti bazar.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan modern dalam skala besar, maka pemerintah daerah perlu melakukan upaya pemberdayaan terhadap keberadaan pasar daerah agar dapat tumbuh dan berkembang, saling memperkuat dan menguntungkan. Mengingat sektor jasa dan perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan suatu potensi yang kuat dalam menopang keberlangsungan perekonomian rakyat. Perkembangan dan pertumbuhan usaha perdagangan modern akhir-akhir ini semakin meningkat, namun di sisi lain kondisi sarana belanja khususnya yang dihuni oleh usaha mikro dan usaha kecil yang ada dipasar daerah perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan dalam bentuk perlindungan pasar-pasar tradisional/modern maupun pemberian kesempatan berusaha melalui partisipasi pengusaha perbelanjaan dalam penyediaan tempat usaha. Pengaturan khusus terhadap pengelolaan perpasaran, khususnya pasar daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum pernah ada, oleh karenanya dengan peraturan daerah ini diharapkan mampu untuk memberikan

inspirasi, motivasi dan kebijakan solutif terhadap pengelolaan pasar baik sekarang maupun yang akan datang, agar lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya mengelola pasar tradisional/modern miliknya yang merupakan aset-aset penting agar dapat:

- a) Mewujudkan keberadaan pasar tradisional/modern yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b) Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- c) Mewujudkan pasar daerah sebagai entitas ekonomi, wahana interaksi sosial dan sumber pendanaan; serta
- d) Memberikan perlindungan, dan pemberdayaan baik kepada pedagang maupun konsumen, serta penataan pasar.

Dengan demikian pengelolaan pasar adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang ada di dalam pasar dengan suatu perencanaan bertujuan untuk penyelesaian tujuan pasar yang lebih baik lagi, pengelolaan pasar sebagaimana diatur peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 tahun 2013 pasal 3 Pengelolaan Pasar Daerah bertujuan untuk:

- a) Mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b) Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;

- c) Meningkatkan peran pasar sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan:
- d) Memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya, dan
- e) Memberikan kontribusi untuk pendapatan asli daerah.

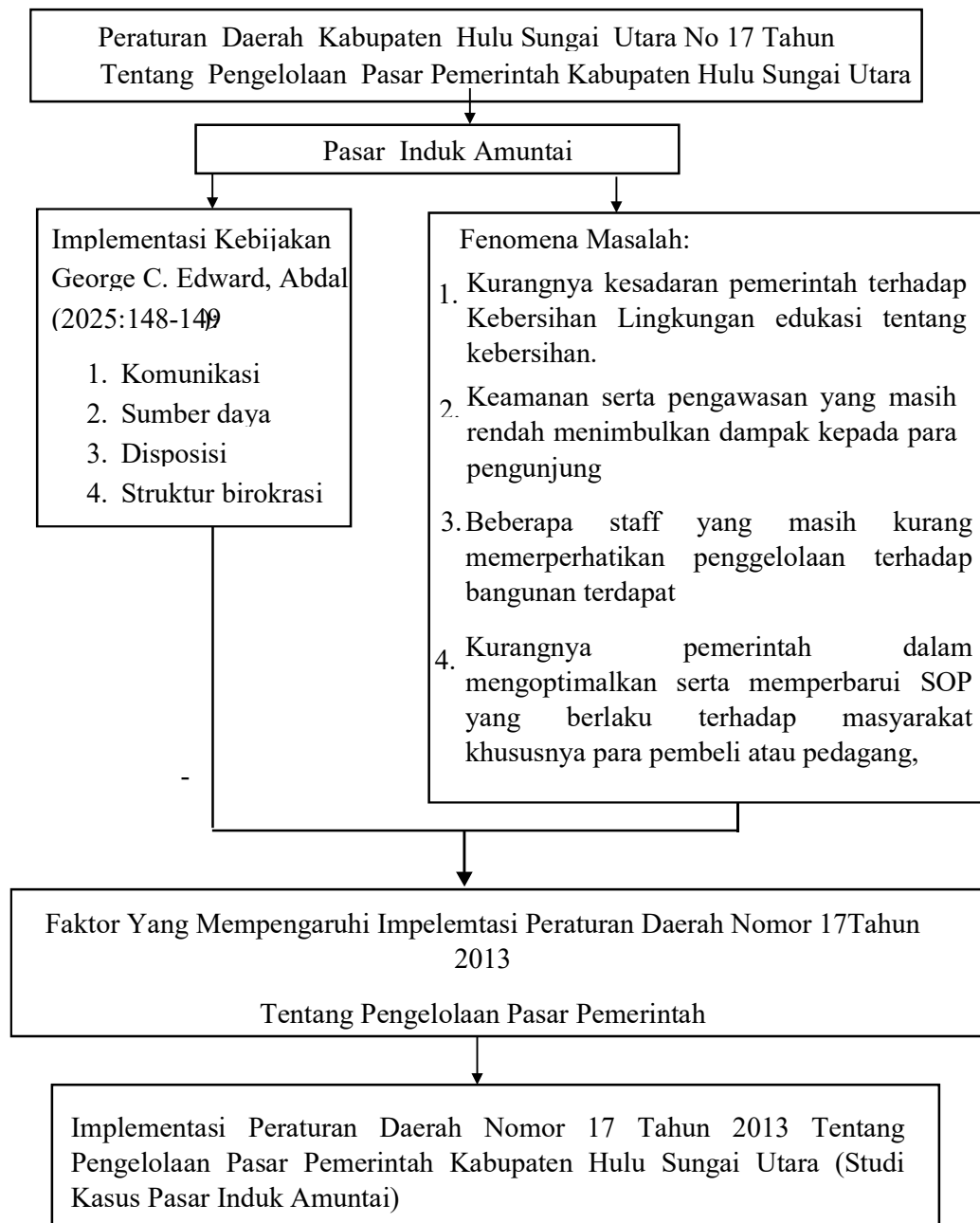
C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah jalan pemikiran dari penulis atau mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan dengan fokus/judul penelitian dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dalam rumusan penelitian ini.

Dalam pengelolaan Pasar Induk Amuntai yang berada di Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah masih ada pedagang yang melakukan terhadap pengelolaan ataupun penataan tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah dan mereka pun tidak menghiraukan aturan yang sudah ditetapkan malah masih banyak pedagang berjualan di area yang dilarang untuk berjualan.

Pemerintah Daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di pasar induk amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah dijelaskan dalam Bab I Pasal 1 ayat (19) Tentang Pengelolaan Pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung oleh Pemerintah Daerah atau BUMD yang ditunjuk, baik terhadap pasar tradisional, pasar khusus, ataupun pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang meliputi perlindungan, penataan, dan pemberdayaan.

Dan di gambarkan pada Kerangka Pemikiran sebagai berikut

Gambar 2. 1**Kerangka Pemikiran**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pasar Induk Amuntai yang beralamat Jl. Abdul Aziz Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan pada Dinas Perindistribustian Perdagangan Koperasi dan UKM (DISPERINDAGKOP) yang beralamat Jl. H. Murhan telp/fax. (0527) 61307 Kelurahan Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara yang mendalam serta analisis dokumen.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penggalan data dapat melalui wawancara, observasi maupun data dokumen. Penggalan data melalui wawancara dapat dilakukan juga melalui telepon, video conference maupun tatap muka langsung. Keuntungan dari survey ini adalah dapat memperoleh berbagai informasi serta hasil dapat dipergunakan untuk tujuan lain. Jadi yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian adalah berkenaan dengan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai).

D. Data dan Sumber Daya

1. Data Primer

Yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui angket, wawancara dan observasi langsung dilapangan yang bersumber dari seluruh aparaturnya terkait dan masyarakat.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi literatur atau perpustakaan serta data resmi yang didapat terhadap objek yang diteliti berasal dari Kecamatan Amuntai Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, sesuai dengan teknik penarikan sumber data yaitu *purposive sampling* adalah cara memilih *purposif* berdasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan sehingga perwakilannya serta sesuai dengan penelitian yang sedang berjalan sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggung jawabkan.

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang-orang yang benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Informan yang peneliti tunjuk pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Ketua Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL)	1
2	Staff UPT Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1
3	Staff UPT Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	1
4	Pedagang	5
5	Masyarakat	5
6	Penjaga Parkir	1
7	Kepala Kebersihan	1
Total		15

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau suatu informasi ilmiah yang membantu penelitian lain yang ingin menggunakan variabel yang sama. Dari informasi tersebut, penelitian ini mengetahui bagaimana cara mengukur atas variabel itu dapat dilakukan dan dengan demikian peneliti dapat menentukan apakah prosedur pengukuran yang sama akan dilakukan atau diperlukan prosedur yang jelas.

Adapun indikator dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Induk Amuntai) adalah memakai teori George C. Edward (Abdal, 2025:148-149) ada empat faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Menurut George C. Edward komunikasi menurutnya lebih, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

2. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan public

3. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerjasama banyak orang. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan.

Supaya mempermudah dan memfokuskan masalah penelitian maka disusunlah kisi-kisi pertanyaan berdasarkan indikator variabel penilitan, bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Ruang Lingkup Sub Variabel	Indikator
Implementasi Teori George C. Edward (Abdal, 2025:148-149)	Komunikasi	1. Tranmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	Sumber Daya	1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	Disposisi	1. Pengangkatan Birokrasi 2. Insentif
	Struktur Birokrasi	1. <i>Standar Operating Prosedurs (SOPs)</i> 2. <i>Fragmentasi</i>

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya

adalah dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka. Menurut Paton (Afifuddin, 2012:131) dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara, interview dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliputi tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.

2. Observasi

Menurut patton, tujuan observasi adlah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati.

Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan tambahan terhadap hasil wawancara.

3. Dokumen/Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang

berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama adalah masalah-masalah tentang sebuah penelitian.

Menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono (2017:246) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara Interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2017:247-248) reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditenaskan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berpikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, flowchart, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Selain itu dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya namun sering digunakan untuk menyajikan data. dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, dan tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami (Sugiyono, 2017:249).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017:252-253) kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan perumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk raport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan proposal penelitian data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, Handycam, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

5. Mengadakan Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan Membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya. Tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, apabila perbedaannya tajam maka peneliti harus mengubah temanya dan menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi SI Administrasi Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Anonim. 2013. *Perauran Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar*
- Anonim. 2016. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016
Tentang Orbanisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan
- Abdal. (2025). *Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Implementasi Kebijakan Publik)*.
Bandung: Widina Utama.
- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anna Sopanah, R. K. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) Berbasis Kearifan
Lokal*. Surabaya: SCOPINDO Media Pustaka.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*. Yogyakarta:
Tanah Air Beta.
- Iwan, Agus Sa'bani Arlan dan Akhmad Barkatillah. 2025. Implementasi Peraturan
Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar
(Studi Kasus Pasar Pinang Habang. *Juenal Kebijakan Publik*. Vol. 2 No. 3, hlm
1209-1220.
- Muhammad Sawir, d. (2025). *Sistem Kebijakan Publik*. Bandung: Widina Media
Utama.
- Rina Yanti, Ramona Handayani dan Moh. Fajar Noorahman. 2024. Implementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013

Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang
Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Danau Panggang)

Saifuddin. (2018). *Pengelolaan Pembelajaran Teoretis dan Praktis*. Yogyakarta: CV
Budi Utama.